



# RENCANA AKSI KEGIATAN

---

*KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR TAHUN 2015 - 2019*

*DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI*

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar Tahun 2015 - 2019. RAK ini berisi informasi tentang uraian rencana kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2015 - 2019.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No 356/Menkes/SK/III/2008, tugas pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar adalah melaksanakan Pencegahan Masuk dan Keluarnya Penyakit Karantina dan Penyakit Menular Potensial wabah, Kekarantinaan, Pelayanan Kesehatan terbatas di wilayah kerja Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas, serta pengendalian dampak risiko lingkungan.

Demikian, kami sampaikan ucapan terima kasih dari semua pihak. Semoga Rencana Aksi Kegiatan ini dapat membantu penyelenggaraan program di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar, dan diharapkan masukan-masukan atau saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Denpasar, 4 Desember 2018

Kepala Kantor



H. Lucky Sanjono, M.Kes

NIP. 19610251988031001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I. LATAR BELAKANG .....	1
II. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	2
III. POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	3
IV. LINGKUNGAN STRATEGIS .....	3
BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	5
I. TUJUAN .....	5
II. SASARAN STRATEGIS .....	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN .....	8
A. Arah Kebijakan .....	8
B. Strategi .....	9
BAB IV RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN .....	12
I. TARGET KINERJA .....	12
BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN, PELAPORAN .....	17
A. Pemantauan .....	17
B. Penilaian .....	17
BAB VI PENUTUP .....	19

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I. LATAR BELAKANG**

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kesehatan mengamanahkan bahwa Renstra Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Program Unit Eselon I

Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian Kesehatan melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyusun Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2015 –2019 yang berisi jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun mendatang.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bertugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantina, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterrorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

KKP dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 5 tahun dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang merupakan

penjabaran dari kebijakan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Kesehatan yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selanjutnya menyusun rencana aksi kegiatan yang menjabarkan output kegiatan yang menunjang tercapainya target indikator-indikator yang ditetapkan dalam rencana aksi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dimana selanjutnya dapat menunjang tercapainya target indikator yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

## **II. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN**

KKP Kelas I Denpasar pada akhir tahun 2005 mempunyai 5 wilayah kerja (4 pelabuhan dan 1 bandara) dan pada akhir tahun 2009 menjadi 4 wilayah kerja pelabuhan, Bandara Ngurah Rai digabung ke Kantor Induk hingga tahun 2016. Hal ini terjadi karena ada beberapa perubahan sehubungan dengan adanya perubahan dari KEPMENKES 265/Men.Kes/SK/III/2004 ke KepMenkes No. 356/Men.Kes/SK/III/2008.

Kewaspadaan dini terhadap penyakit menular di pintu masuk Provinsi Bali juga telah dilakukan dengan dilaksanakannya simulasi kesiapsiagaan pandemi flu burung pada tahun 2008. Selain itu juga penanggulangan pandemi Influenza H1N1 pada tahun 2016 di pintu masuk Provinsi Bali. Berdasarkan pengalaman tersebut diharapkan pengganggangan pembangunan kesehatan di lingkungan pelabuhan dan bandara perlu lebih difokuskan pada upaya promotif dan preventif dengan tetap memperhatikan anggaran kuratif mengingat kejadian seperti tersebut diatas bisa terjadi sewaktu-waktu. Untuk itu dibutuhkan suatu perencanaan kontijensi untuk kejadian yang berpotensi PHEIC.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar sebagai UPT Pusat mempunyai tugas pokok kegiatan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi, sebagai upaya untuk pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, yang didukung oleh kegiatan pengendalian risiko lingkungan dan pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan dan bandara. Untuk mendukung kegiatan tersebut, dilakukan penyelenggaraan fungsinya antara lain pelaksanaan kekarantinaan pelaksanaan pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kesehatan kerja, pemberian sertifikat kesehatan OMKA, pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut, dan lain –lain serta didukung oleh ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

Sistem informasi kesehatan relatif belum optimal, data dan informasi untuk *evidence planning* tidak tersedia tepat waktu dan belum dimanfaatkan secara maksimal terutama untuk menyusun perencanaan. Untuk itu diharapkan pada masa yang akan datang agar meningkatkan mutu dan validitas data agar dapat dimanfaatkan secara optimal baik untuk perencanaan yang akan datang maupun untuk pengambilan keputusan.

Untuk Sumber Daya Manusia Kesehatan relatif masih kurang. Target di setiap wilayah kerja KKP Kelas I Denpasar mempunyai tenaga Dokter, namun dari 4 wilker, 50% nya belum mempunyai dokter. Selain itu juga masih dibutuhkan tenaga perawat, kesehatan lingkungan dan tenaga non kesehatan lainnya.

Program Kebijakan dan Manajemen perlu terus dikembangkan dan lebih difokuskan, utamanya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui penguatan manajerial dan sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas serta Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan perlu ditingkatkan agar pengelolaan program Kementerian Kesehatan dapat terselenggara secara efektif, efisien, dan akuntabel. Meneruskan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan melakukan kerjasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya untuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Keberhasilan pengawasan penganggaran telah mencapai predikat Wajar Dengan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan melaksanakan pembangunan kesehatan juga dapat digambarkan dengan capaian indikator program-program.

Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat ditunjukkan dengan tercapainya indikator sasaran; namun saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk lebih memberikan penajaman dan kesinambungan program-program yang dilaksanakan untuk periode berikutnya.

### **III. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Penularan infeksi penyakit menular utamanya AIDS/HIV dan DBD masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol di lingkungan bandara dan pelabuhan sehingga perlu upaya keras untuk dapat memberantasnya. Selain itu ada beberapa penyakit menular seperti H1N5, H1N1 dan penyakit Pes masih terdapat di berbagai daerah sehingga perlu kita waspadai secara dini.

Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat, yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat di sekitar pelabuhan dan bandara.

### **IV. LINGKUNGAN STRATEGIS**

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kerja serta kontribusi positif tersebut, “wawasan kesehatan” perlu dijadikan sebagai asas pokok program pembangunan nasional, dalam pelaksanaannya seluruh unsur atau subsistem dari SKN berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional berwawasan kesehatan yang diejawantahkan dalam bentuk program-program dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan. Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya; disamping tanggung jawab individu dan keluarga. Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, SKN dapat bersinergi secara dinamis dengan berbagai sistem nasional lainnya seperti: Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Perekonomian Nasional, Sistem Ketahanan Pangan Nasional, Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional, Sistem Ketenaga-kerjaan dan Transmigrasi, serta sistem-sistem Nasional lainnya.

Untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan kesehatan, diperlukan pemikiran tidak konvensional mengenai kebijakan program kesehatan masyarakat dan sektor kesehatan pada umumnya untuk mencakup determinan kesehatan lainnya, terutama yang berada diluar domain sektor kesehatan. Reformasi kesehatan masyarakat yang meliputi reformasi kebijakan SDM kesehatan, reformasi kebijakan pembiayaan kesehatan,

reformasi kebijakan pelayanan kesehatan, dan reformasi untuk kebijakan yang terkait dengan terselenggaranya *Good Governance* sudah harus dilakukan.

Pemberdayaan masyarakat diarahkan agar masyarakat berdaya untuk ikut aktif memelihara kesehatannya sendiri, melakukan upaya pro-aktif tidak menunggu sampai jatuh sakit, karena ketika sakit sebenarnya telah kehilangan nilai produktif. Upaya promotif dan preventif perlu ditingkatkan untuk mengendalikan angka kesakitan yang muncul dan mencegah hilangnya produktivitas serta menjadikan sehat sebagai fungsi produksi yang dapat memberi nilai tambah.

Perlu juga diperhatikan adanya perkembangan lingkungan strategis (linstra), baik dalam lingkup internasional, nasional, dan lokal yang akan mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Isu Strategis Internasional antara lain globalisasi seperti implementasi WTO, APEC, dan AFTA dengan segala risiko deregulasi dan perijinan yang harus diantisipasi, pemanasan global, *biosecurity*, *bioterrorism*, penggunaan teknologi *high cost*, *Global Epidemic Diseases*, *Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health*, *Millenium Development Goals* (MDG's), krisis ekonomi global, krisis bahan bakar dan pangan.

Komitmen ASEAN dan internasional lainnya, Komitmen Bilateral dengan negara perbatasan, terbukanya peluang lapangan kerja kesehatan secara global, serta masuknya investasi dan tenaga kerja/profesi kesehatan dari negara lain. Harmonisasi regulasi dan implementasi AFTA dan kesepakatan global, termasuk tenaga kesehatan. Isu Strategis Nasional antara lain desentralisasi (penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah), penyakit *new emerging disease*, reformasi dan demokratisasi, dinamika politik nasional, krisis ekonomi dan keterbatasan dana Pemerintah, pengurangan anggaran pusat, peningkatan anggaran daerah, deregulasi diberbagai perijinan dan bidang pembangunan, pengurangan peran Pemerintah, privatisasi dan *outsourcing*, pemberdayaan masyarakat, IPM dan kualitas SDM rendah, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, serta kemiskinan dan pengangguran. Isu lokal diantaranya disparitas status kesehatan dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Beberapa Kementerian dan Lembaga memberikan perhatian khusus kepada daerah tertentu yang tertinggal dibandingkan daerah lainnya, dengan program dan strategi khusus agar daerah-daerah tersebut mampu mengejar ketinggalannya dan sejajar dengan daerah lainnya; mensinergikan pembangunan kesehatan dalam upaya-upaya itu dinilai lebih berhasil guna dan berdaya guna. Pembangunan kesehatan yang dicanangkan pada periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II telah memperhatikan berbagai masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagaimana telah didiskusikan dalam *National Summit* pada tanggal 30 Oktober 2009. Penjabaran isu pokok pembangunan kesehatan tersebut di atas yang berkaitan dengan tupoksi Kantor Kesehatan Pelabuhan, meliputi:

- a. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
- b. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan.
- c. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor.
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **I. VISI DAN MISI**

Visi misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong. Visi tersebut diwujudkan dengan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

#### **II. TUJUAN**

Adapun tujuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan menjadi 116.200 unit pada akhir tahun 2019
2. Terlaksananya respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP sebesar 100% pada akhir tahun 2019
3. Meningkatnya jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit sebanyak 32.230 pada akhir tahun 2019
4. Terlaksananya pelayanan kesehatan pada situasi khusus sebanyak 21 posko pada akhir tahun 2019
5. Tercapainya pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebanyak 4 wilayah kerja dan 1 bandar udara pada akhir tahun 2019
6. Tercapainya penerbitan sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah sebanyak 12.400 dokumen pada akhir tahun 2019
7. Tercapainya jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi sebanyak 4 wilayah kerja dan 1 bandar udara pada akhir tahun 2019
8. Tercapainya Pelabuhan/Bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area sebanyak 4 wilayah kerja dan 1 Bandara pada akhir tahun 2019
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung sebanyak 1.100 orang pada akhir tahun 2019
10. Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu sebanyak 4 wilayah kerja dan 1 bandara pada akhir tahun 2019

11. Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP sebanyak 15 tempat kerja pada akhir tahun 2019
12. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebanyak 40 dokumen pada akhir tahun 2019
13. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P sebanyak 7 jenis pada akhir tahun 2019
14. Jumlah pengadaan sarana prasarana sebanyak 165 unit pada akhir tahun 2019

### III. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar yang dijabarkan dalam Rencana Aksi Program KKP Kelas I Denpasar merupakan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan. Sasaran tersebut adalah meningkatnya pengendalian penyakit yang ditandai dengan : Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah. Dalam upaya tercapainya sasaran strategis maka ditetapkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
10. Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu
11. Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP
12. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
13. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
14. Jumlah pengadaan sarana prasarana

Dukungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar terhadap pencapaian tujuan Ditjen P2P yaitu terselenggaranya pencegahan dan pengendalian penyakit secara berhasil guna dan berdaya guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Pelabuhan Sehat melalui :

1. Mengembangkan (investasi) sumber daya manusia.
2. Memperkuat surveilans epidemiologi dan aplikasi teknologi informasi.
3. Meningkatkan Upaya Kekejarantinaan.
4. Meningkatkan Upaya Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan.
5. Meningkatkan Upaya Pemberantasan Vektor dan Binatang Penular Penyakit.
6. Meningkatkan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah.

7. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)
8. Terpenuhi kelengkapan sarana dan prasarana.
9. Meningkatkan koordinasi, kemitraan dan jejaring kerja.
10. Meningkatkan upaya promosi kesehatan
11. Memperkuat Instalasi.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN**  
**DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN**

**A. Arah Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka ditetapkan kebijaksanaan dan program sebagai berikut :

1. Pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia di bidang kesehatan lingkungan yang secara fungsional merupakan sumberdaya inti dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program lingkungan sehat.
2. Pengendalian dan Pencegahan penyakit diarahkan untuk memantapkan jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan dengan masyarakat termasuk swasta untuk percepatan program pengendalian dan pencegahan penyakit menular melalui pertukaran informasi, pelatihan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pemanfaatan sumberdaya lainnya.
3. Penyusunan rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar periode lima tahunan. Perencanaan dibuat berdasar pola (*bottom up*) disesuaikan dengan sumber daya yang ada, situasi dan kondisi. Sedangkan bahan perencanaan didasarkan pada *eviden based epidemiology* dan masukan dari petugas lapangan
4. Penyusunan perencanaan pengembangan program kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang sistematis, terukur, dan realistis serta dapat dilaksanakan sesuai skala waktu yang ditetapkan (*Systematic Measure Assesment Reliable Time - SMART*). Upaya ini dilakukan dengan membuat perencanaan bulanan dan perencanaan tahunan untuk setiap bidang dan setiap seksi.
5. Penyempurnaan dan penyusunan draf Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap program kegiatan, agar dalam melaksanakan tugas di lapangan terjadi keseragaman.
6. Penggunaan anggaran mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas serta anggaran berbasis kinerja.
7. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Kesehatan Pelabuhan diarahkan pada tersedianya sumber daya manusia sesuai kebutuhan baik kuantitas dan kualitasnya. Upaya pemberdayaan ini dilakukan dengan cara penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan dan tingkat kompetensinya / keahliannya, pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar aturan. Sanksi mulai dari sanksi ringan sampai dengan sanksi terberat. Menyeleksi pemberian izin belajar, penegakan disiplin pegawai, pembinaan rutin, kaderisasi, pengembangan potensi pegawai, Pemberdayaan ini dimaksudkan agar setiap pegawai mempunyai tingkat kompetensi memadai, dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi bagi organisasi.
8. Pembuatan aturan tata tertib pegawai mengenai absensi kehadiran; pakaian seragam; pelayanan kepada masyarakat; serta pemakaian dan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor; untuk menjamin kelancaran tugas operasional di lapangan, serta untuk menjaga sarana dan prasarana agar tidak cepat rusak. maka dilakukan perawatan secara periodik sesuai tingkat kebutuhan.

9. Peningkatkan mutu pelayanan dilakukan dengan pembuatan standar pelayanan, menyiapkan petugas yang mempunyai kompetensi sesuai tingkat kebutuhan, menyediakan sarana dan prasarana dengan didukung teknologi yang memadai serta pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan yang standard dan tidak bertentangan dengan kode etik.
10. Menumbuh kembangkan upaya kemitraan dengan instansi terkait melalui hubungan yang saling menguntungkan. Kemitraan ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan kesepahaman terhadap Kantor Kesehatan Pelabuhan akan perlunya kerjasama dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Upaya ini dilakukan dengan mengadakan advokasi program kesehatan, sosialisasi perundang-undangan, serta berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program pembangunan secara keseluruhan di wilayah Pelabuhan
11. Peningkatan jejaring kerja lintas program dan lintas sektoral guna menangani masalah kesehatan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan.

## **B. Strategi**

Strategi pencapaian sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai skala prioritas. Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

### **1. Meningkatkan upaya Kekejarantinaan**

Upaya kekejarantinaan KKP dilaksanakan dengan meningkatkan pengawasan terhadap alat angkut dan komoditi OMKA di pelabuhan. Upaya kekejarantinaan lainnya dilakukan melalui pengetatan prosedur kekejarantinaan dan prosedur penerbitan dokumen kesehatan dengan tidak mengurangi aspek kelancaran arus orang dan barang. Disamping itu juga dilakukan dengan meningkatkan kemampuan tenaga pemeriksa di lapangan serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran UU Karantina.

### **2. Mengefektifkan Surveilans Epidemiologi**

Agar upaya penanggulangan penyakit dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien, serta dampaknya tidak sampai menimbulkan masalah kesehatan masyarakat yang luas maka deteksi dini terhadap potensi penyebaran penyakit menular potensi wabah perlu ditingkatkan. Upaya ini dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan surveilans epidemiologi melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data.

### **3. Meningkatkan Upaya Sanitasi dan Dampak Resiko Lingkungan**

Upaya sanitasi dan dampak resiko lingkungan meliputi :

- a. Pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan minuman.  
Salah satu upaya dalam pengendalian resiko lingkungan adalah mengawasi kualitas air tersebut, mulai dari sumber hingga pada sipemakai (konsumen). Langkah pengawasan akan dilakukan melalui pemeriksaan kualitas air di darat dan di kapal. Pemeriksaan air di darat dilakukan dengan pemeriksaan rutin sebulan sekali dan lebih sering bila ada hal-hal yang perlu perbaikan. Hal ini dilakukan pada reservoir, hydran, tongkang air dan mobil air. Sedangkan pengawasan air di kapal ditujukan pada sisa air di kapal sebelum kapal mengisi air di pelabuhan. Untuk mencegah dan menjaga agar makanan tidak menjadi sumber penularan penyakit yang pada akhirnya dapat menimbulkan KLB, langkah yang akan dilakukan adalah meningkatkan pengawasan makanan didarat dan di kapal penumpang. Pengawasan makanan di darat dilakukan

dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap para penjamah makanan, keadaan sanitasi rumah makan dan kualitas makanan yang dihidangkan. Untuk menunjang kegiatan ini akan dilakukan grading rumah makan dan pemberian sertifikat laik kesehatan

- a. Pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan gedung/bangunan.
- b. Pengawasan pencemaran udara, air dan tanah
- c. Pemeriksaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi kapal di lingkungan pelabuhan dan lintas batas darat Negara

**4. Meningkatkan Upaya Pemberantasan Vektor dan Binatang Penular Penyakit**

Upaya Pemberantasan vektor dan binatang penular penyakit meliputi :

- a. Pemberantasan Tikus di Darat dan di Kapal
- b. Pemberantasan Serangga

**5. Meningkatkan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah**

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan guna menjaga eksistensi KKP dimasa yang akan datang, agar image masyarakat tetap positif terhadap keberadaan KKP. Langkah yang akan dilakukan adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan kesehatan terbatas, rujukan dan gawat darurat medik di wilayah pelabuhan dan lintas batas darat negara.
- b. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra di wilayah kerja pelabuhan, bandara dan lintas batas darat Negara.
- c. Melakukan pengujian kesehatan nahkoda dan anak buah kapal serta penjamah makanan.
- d. Vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional
- e. Pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah di wilayah pelabuhan dan lintas batas darat negara, serta ketersediaan obat-obatan/peralatan P3K angkut

**6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) akan terus dilakukan guna meningkatkan profesionalitas pegawai agar mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi dengan cepat dan tepat. Langkah yang akan dilakukan adalah mengadakan analisis kebutuhan tenaga secara komprehensif, mengefektifkan pembinaan ke wilayah kerja, memberikan kesempatan bagi pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal dan informal, serta pendidikan penjejangan sesuai kebutuhan organisasi.

**7. Melengkapi sarana dan prasarana**

Guna menjamin keberhasilan dan kelancaran dalam operasional kegiatan, langkah yang akan dilaksanakan oleh KKP antara lain melengkapi sarana untuk keperluan rutin, keperluan teknis dan sarana penunjang berupa komputer, radio komunikasi (marine radio), menambah kendaraan operasional baik roda dua (motor) maupun roda empat (mobil) dan mengoptimalkan anggaran sesuai dengan usulan kegiatan. serta peralatan lain pendukung kegiatan.

**8. Mengadakan koordinasi, kemitraan dan jejaring kerja**

Upaya untuk mempercepat pencapaian program akan dilakukan dengan mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Koordinasi lintas program dilaksanakan setiap bulan sekali sedangkan lintas sektor dilaksanakan pada saat *coffe morning* yang diadakan Adpel. Disamping itu akan dilaksanakan kemitraan dan jejaring kerja antar instansi yang ada di pelabuhan, bandara dan PLBD, guna menyamakan persepsi dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang berkembang.

**9. Melaksanakan promosi kesehatan**

KKP tidak akan dikenal oleh kalangan masyarakat kalau KKP sendiri tidak berusaha memperkenalkannya. Sependapat dengan hal ini KKP akan melakukan promosi kesehatan. Promosi ini dilakukan melalui pengobatan gratis, pembuatan brosur dan liflet, mengadakan penyuluhan tentang kesehatan , pembuatan bulletin yang berisi tentang masalah kesehatan dan perkembangan KKP.

**10. Memperkuat Instalasi**

Untuk mendukung tugas pokok, KKP akan memperkuat instalasi yang sudah ada yaitu instalasi farmasi dan instalasi laboratorium. Langkah yang dilakukan dalam memperkuat instalasi farmasi melalui kerjasama dengan perusahaan farmasi. Upaya ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengadaan obat agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Sedangkan untuk Instalasi laboratorium dilakukan dengan menambah peralatan dan bahan laboratorium, sehingga cakupan jenis pelayanan dapat diperluas.

## **BAB IV**

### **RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN**

Memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, tujuan, arah kebijakan dan strategi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2015- 2019.

#### **I. TARGET KINERJA**

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019.

Sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam Rencana Aksi Program ditetapkan dengan merujuk pada sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana didistribusikan pada Sub Direktorat, Bagian dan UPT. Untuk mencapai sasaran, maka indikator kinerja KKP Kelas I Denpasar adalah:

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
  - a. Penyediaan Bahan pendukung dokumen kesehatan kapal PHQC/SSCEC
  - b. Layanan Kerantinaan Kesehatan dalam rangka penerbitan PHQC
  - c. Layanan pemeriksaan kesehatan alat angkut dalam rangka penerbitan SSCEC/SSCC
  - d. Workshop SIMKESPEL untuk Petugas KKP
  - e. Sosialisasi Penerbitan Dokumen On-Line LS/LP/Masyarakat Komunitas Pelabuhan dan Bandara
  - f. Konsultasi SIMKESPEL ke pusat
  - g. Sosialisasi UU Kekarantinaan Kesehatan kepada LS/LP terkait di pelabuhan dan bandara
  - h. Bahan pendukung pemeriksaan alat angkut
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
  - a. Verifikasi rumor penyakit menular berpotensi KLB di PMN
  - b. Investigasi dan penanggulangan PM berpotensi KLB di pintu masuk negara dan PLBD
  - c. Surveilans faktor risiko penyakit berpotensi KLB pada bencana
  - d. Pengadaan bahan kesiapsiagaan situasi khusus pada bencana
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
  - a. Penyediaan Bahan pendukung dokumen kesehatan kapal COP
  - b. Layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan COP
  - c. Pengawasan Lalu Lintas keberangkatan kapal di Poskes KKP Kelas I Denpasar
  - d. Pertemuan koordinasi pengendalian dan penanggulangan penyakit berpotensi KLB di PM
  - e. Konsultasi kegiatan teknis dalam pengawasan orang, barang dan alat angkut di KKP Kelas I Denpasar ke pusat
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
  - a. Layanan kesehatan pada situasi khusus

- b. Persiapan pengawasan lalu lintas orang, barang dan alat angkut pada arus mudik dalam situasi poskes lebaran dan nataru
  - c. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas orang dan alat angkut dalam poskes mudik situasi khusus lebaran
  - d. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas orang dan alat angkut dalam poskes mudik situasi khusus nataru
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
- a. Pelaksanaan Table TOP Exercise Penanggulangan KKM di Pelabuhan Celukanbawang
  - b. Pertemuan Sosialisasi Rencana Kontijensi Penanggulangan KKM di Wilker Pelabuhan Gilimanuk
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
- a. Penerbitan surat ijin angkut jenazah/abu jenazah/kerangka
  - b. Pelatihan ACLS bagi dokter
  - c. Pelatihan BTCLS bagi perawat
  - d. Workshop bagi dokter/perawat
  - e. Workshop petugas teknis dalam rangka upaya cegah tangkal faktor risiko penyakit dan kasus emergency
  - f. Pengawasan faktor risiko kesehatan bagi pelaku perjalanan
  - g. Pengawasan kesehatan crew pesawat secara random
  - h. Sosialisasi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan dan bandara
  - i. Sosialisasi pengawasan lalu lintas jenazah ke komunitas pelabuhan dan fasyankes di Wilker Celukanbawang
  - j. Konsultasi petugas wilker ke induk
  - k. Koordinasi program kekarantinaan kesehatan dengan LS/LP di Provinsi Bali
  - l. Pelayanan kesehatan kegawatdaruratan di Wilker (kecelakaan kapal/pesawat, dll)
  - m. Pelayanan kesehatan kegawatdaruratan di Wilker (event nasional/internasional)
  - n. Penyelenggaraan rujukan dan respon cepat di wilker
  - o. Penerbitan dokumen SIMKESPEL on-line dan kegiatan UKLW
    - Sertifikat keterangan laik terbang (4.500 sertifikat)
    - Sertifikat ijin angkut orang sakit (400 sertifikat)
    - Penerbitan/legalisasi ICV (6.100 sertifikat)
    - Sertifikat pengujian kesehatan
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
- a. Workshop bagi petugas sanitasi dan dampak risiko lingkungan
  - b. Peningkatan kemampuan petugas teknis sanitasi dalam rangka pengawasan faktor risiko pada lingkungan
  - c. Pengawasan TPM di pelabuhan dan bandara
  - d. Pengawasan faktor risiko kesehatan lingkungan di
  - e. wilayah pelabuhan dan bandara
  - f. Pengawasan bakteriologis air bersih
  - g. Pengawasan kimia air bersih
  - h. Pengawasan chlor dan ph air bersih
  - i. Pengawasan pencemaran badan air di wilayah pelabuhan dan bandara
  - j. Pengawasan kualitas udara di wilayah pelabuhan dan bandara
  - k. Pengawasan pencemaran tanah di wilayah pelabuhan dan bandara
  - l. Pengawasan sanitasi bangunan

- m. Pengawasan faktor risiko lingkungan dalam rangka arus mudik lebaran
  - n. Pengawasan faktor risiko lingkungan dalam rangka situasi khusus keagamaan
  - o. Pengawasan faktor risiko lingkungan dalam rangka kesiapsiagaan hari raya natal dan tahun baru
  - p. Pengadaan bahan pendukung kegiatan medis di klinik kkp dan wilker
    - bahan pendukung laboratorium
    - reagen pemeriksaan laboratorium
    - bahan pendukung pengawasan kualitas air bersih/minum
    - reagen water test kit
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
- a. Layanan Capaian eliminasi malaria
    - 1. Pertemuan koordinasi dan sosialisasi hasil penemuan surveilans migrasi malaria di Bandara
    - 2. Pertemuan koordinasi dan sosialisasi hasil penemuan surveilans migrasi malaria di Pelabuhan Benoa
    - 3. Pertemuan koordinasi dan sosialisasi hasil penemuan surveilans migrasi malaria di Pelabuhan Padangbai, Gilimanuk, dan Celukanbawang
  - b. Layanan pengendalian vektor dan BPP
    - 1. Monitoring resistensi / efikasi 2 jenis bahan aktif insektisida
    - 2. Diklat pengendalian vektor di bandara/pelabuhan laut
    - 3. Layanan pengendalian vektor DBD
    - 4. Layanan survei vektor Pes
    - 5. Layanan pengendalian vektor Diare
    - 6. Layanan survei vektor DBD
    - 7. Layanan survei vektor diare
    - 8. Layanan survei vektor
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
- a. Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS
  - b. Layanan Pengendalian Penyakit TB
10. Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu
- a. Pelayanan Kesehatan dalam rangka Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit pada Sopir dalam rangka Arus Mudik
  - b. Pelayanan Kesehatan dengan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit di lingkungan Komunitas Pelabuhan dan Bandara
11. Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP
- a. Sosialisasi Pengendalian Tembakau untuk Masyarakat Pelabuhan dan Sekitarnya
12. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
- a. RKAKL/DIPA (awal dan revisi) 2 dokumen
  - b. Laporan tahunan 1 dokumen
  - c. Laporan Keuangan 2 dokumen
  - d. Laporan BMN 2 dokumen
  - e. Lakip 1 dokumen
  - f. Profil 1 dokumen
  - g. Proposal PNBPN 1 dokumen

- h. dokumen kepegawaian 2 dokumen (kontrak dan penilaian)
- i. e monev DJA 12 dokumen
- j. e monev Bappenas 4 dokumen
- k. LEB 12 dokumen

13. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

- a. Diklatpim
- b. Diklat Jabfung Arsiparis
- c. Peningkatan kapasitas SDM

14. Jumlah pengadaan sarana prasarana

- a. Pengadaan kendaraan bermotor
- b. Pengadaan Alat kesehatan
- c. Fasilitas penunjang perkantoran

## II. PENDANAAN KEGIATAN

Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan meliputi 5 bidang kegiatan yang meliputi:

1. Surveilans dan Karantina Kesehatan dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3.863.123.000,-
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 1.124.000.000,-
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 189.200.000,-
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 56.913.000,-
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 21.384.737.000,-

### Sasaran kegiatan (Output)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	116.200 sertifikat
		2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100 %
		3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	32.230 dokumen
		4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	20 posko

		5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	4 wilayah kerja
		6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	10.900 sertifikat
		7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	4 wilayah kerja & 1 Bandar Udara
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic	8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	4 wilayah kerja & 1 bandar Udara
3	Menurunnya penyakit menular langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	640 orang
4	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	10. Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu	4 wilayah kerja & 1 bandar udara
		11. Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP	15 tempat kerja
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	12. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40 dokumen
		13. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	7 jenis
		14. Jumlah pengadaan sarana prasarana	165 unit

## BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN, PELAPORAN

### A. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan adalah sebagai bentuk dari pengendalian internal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar berupa kegiatan secara terus menerus dari pimpinan dan pegawai untuk mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan kegiatan. Pengendalian internal yang dilakukan melalui :

- a. Rencana Aksi yang jelas, tepat dan terjadwal sesuai POA
- b. Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya sesuai dengan DIPA/RKAKL.
- c. Ketaatan terhadap peraturan perundangan

Pemantauan progres pencapaian target indikator kinerja kegiatan secara rutin dilaksanakan setiap awal bulan setiap triwulan dan didukung pula dengan evaluasi tiap semester. Pemantauan juga dilakukan secara eksternal oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan Aplikasi e-Monev DJA, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui aplikasi e-Monev Bappenas.

### B. Penilaian

Berikut adalah indikator KKP Kelas I Denpasar beserta cara penghitungannya :

No.	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	Akumulasi jumlah hasil sertifikat PHQC, SSCEC dalam satu tahun
2	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam dibagi jumlah SKD KLB dikali 100%
3	Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	Akumulasi jumlah sertifikat COP, Gendec dan hasil pemeriksaan surveilans rutin di klinik layanan lainnya dalam satu tahun
4	Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	Akumulasi jumlah posko yang melakukan pelayanan kesehatan pada saat lebaran, natal, tahun baru dan lainnya dalam satu tahun
5	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
6	Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	Akumulasi jumlah sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat izin angkut jenazah, jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam satu tahun
7	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang

		mempunyai TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan
8	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal $\leq 1$ , HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6 dalam satu tahun
9	Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	Akumulasi jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya dalam satu tahun
10	Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu	Akumulasi jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu dalam satu tahun
11	Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP	Akumulasi jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP dalam satu tahun
12	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	Akumulasi jumlah dokumen sebanyak 40 dokumen terdiri dari RKAKL/DIPA (awal dan revisi) 2 dok, Laptah 1 dok, Laporan Keuangan 2 dok, Laporan BMN 2 dok, Lakip 1 dok, Profil 1 dok, Proposal PNBPN 1 dok, dokumen kepegawaian 2 dok (kontrak dan penilaian), e monev DJA 12 dok, e monev Bappenas 4 dok, LEB 12 dok
13	Jumlah pengadaan sarana prasarana	Akumulasi jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu tahun
14	Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	Akumulasi jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM B/BTKLPP dalam kurun waktu satu tahun

### C. Pelaporan

Pelaksanaan program yang baik akan jauh lebih bermakna bila didukung dengan pelaporan kegiatan yang handal. Didalam pelaporan tersebut ada pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan program. Pelaporan tersebut yaitu :

- Laporan Evaluasi Kinerja
- Laporan Keuangan
- Laporan Tahunan
- Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Aksi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar ini disusun untuk dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kegiatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi pada pertengahan dan akhir periode 5 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Aksi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar 2015-2019, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.